

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. (Nasir, Muh dan Maulizar, 2008)

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi hampir semua bangsa di dunia. Kemiskinan pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi, serta kesejahteraan penduduk. Hal ini di sebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan yang di manfaatkan terutama tingkat pendidikan formal maupun non formal. (Supriatna, 2000)

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan ekonomi kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. (Suharjo, 1997)

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena hingga kini belum bisa diatasi dan bahkan kini gejutannya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia. (Alfian, 2000)

Kemiskinan juga merupakan salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dan wilayah sehingga menyebabkan kemiskinan salah satu tema utama pembangunan nasional. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sering kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. (Suryahadi dan Sumarto, 2001)

Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi Negara berkembang, bahkan negara-negara maju pun mengalami kemiskinan walaupun tidak sebesar

Negara berkembang. Persoalannya sama namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di Negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka tetapi bagi Negara berkembang persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin melebihi dua pertiga dari penduduknya. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan social maupun politik di masa yang akan datang. (booth dan sundrum, 1987)

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. (World Bank, 2004)

Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara

bermartabat. (Agussalim, 2009)

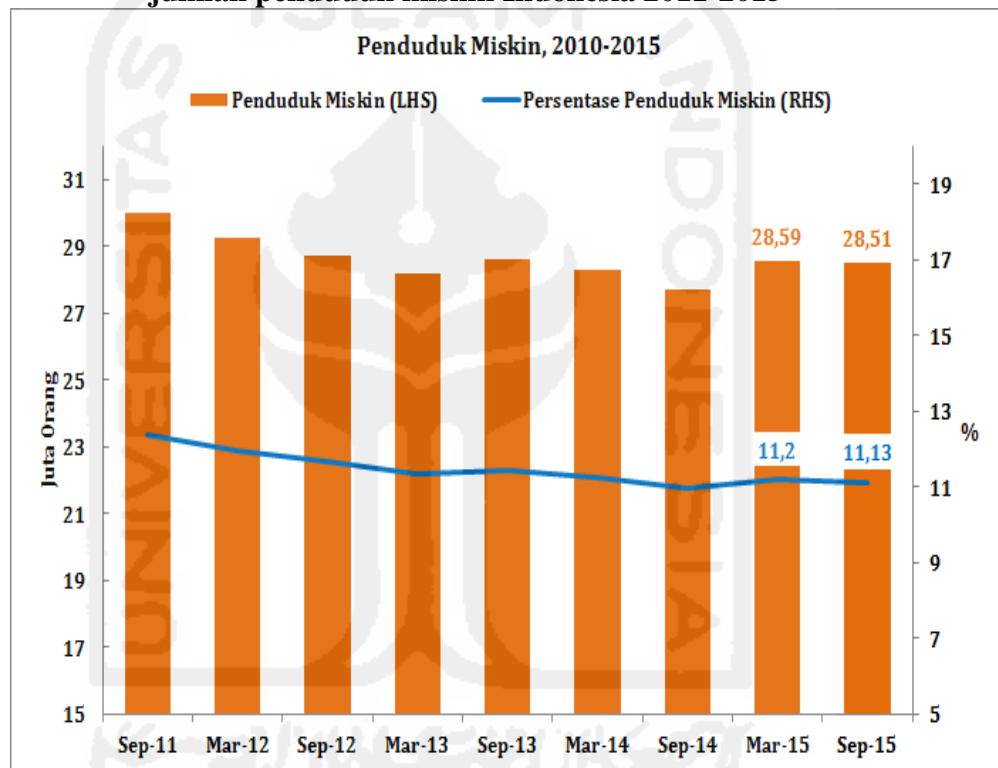
Menurut badan pusat statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan. Sedangkan bagi dinas social mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Menurut bank dunia salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka di kategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah - masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain pendekatannya harus dilakukan lintas sector, lintas pelaku secara terpadu, secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, yang berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan. Beberapa diantaranya yang menjadi

bagian dari penanggulangan kemiskinan tersebut yang perlu tetap ditindaklanjuti dan disempurnakan implementasinya adalah perluasan akses kredit pada masyarakat miskin, peningkatan pendidikan masyarakat, perluasan lapangan kerja. (Hureirah, 2005)

Gambar 1.1
jumlah penduduk miskin Indonesia 2011-2015

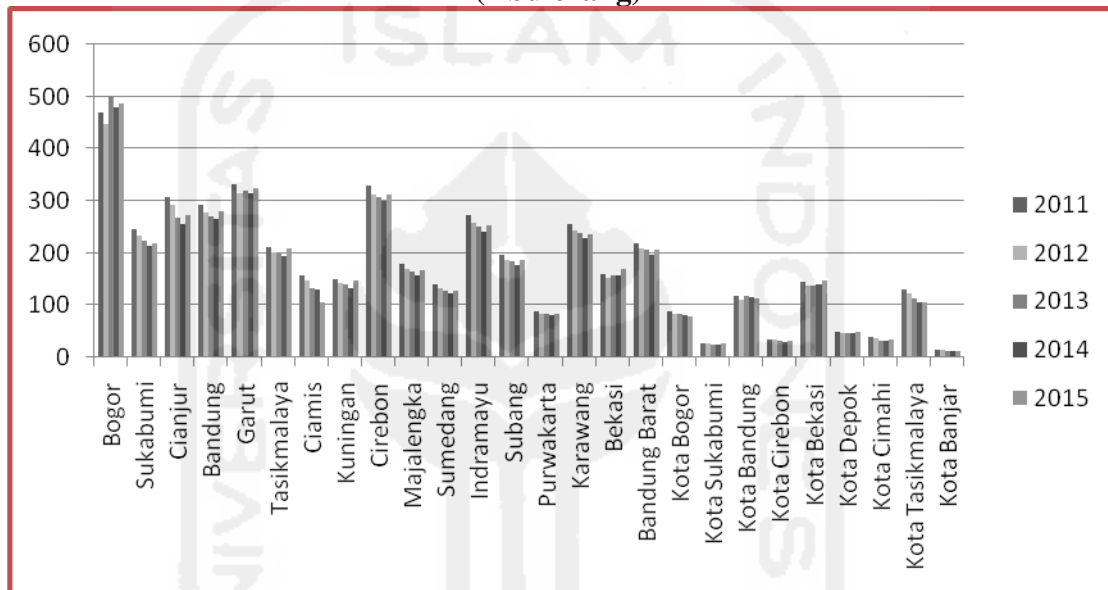


Sumber : BPS dan CEIC (2016)

Berdasarkan gambar 1.1 jumlah penduduk miskin dari tahun 2011 bulan september sampai tahun 2013 bulan maret mengalami penurunan, pada tahun 2013 bulan September sampai tahun 2015 bulan maret mengalami naik turun ,tahun 2015 bulan maret sampe September 2015 mengalami penurunan jumlah penduduk dari 28,59 menjadi 28,51. Meskipun tahun terakhir jumlah kemiskinan mengalami

penurunan menjadi 28,51 tapi itu bukan angka jumlah kemiskinan yang kecil, jadi pemerintah harus tetap memikirkan upaya – upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin supaya Indonesia bebas dari kemiskinan.

Gambar 1.2
jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Barat 2011-2015
(ribu orang)



Sumber : BPS

Berdasarkan gambar 1.2 jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami kenaikan pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat di tahun 2013 sebesar 499 di Kabupaten Bogor dan jumlah penduduk miskin paling sedikit pada tahun 2014 yaitu 12,7 di Kota Banjar.

Perbandingan Angka Kemiskinan antara Indonesia dan Jawa Barat, di Indonesia angka kemiskinan dari tahun 2011 sampai 2014 mengalami penurunan sedangkan 2015 mengalami kenaikan begitu juga di Provinsi Jawa Barat. Angka

kemiskinan 2011 sampe 2014 mengalami penurunan di tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan. Angka kemiskinan di Indoesia pada tahun 2015 sebesar 28,51 juta jiwa sedangkan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sebesar 4.435,70 jiwa Ini berarti kemiskinan di Jawa barat memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kemiskinan Indonesia hal ini dapat dilihat dari kesaaaman penurunan dan kenaikan kemiskinan.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia. Program yang di pilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah – langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab – sebab timbulnya persoalan itu (Sumodiningrat, 1998).

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk meneliti tentang **”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa barat menurut Kabupaten / Kota tahun 2011-2015 ”**.

1.2 Rumusan masalah :

Dari uraian yang telah disampaikan, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap jumlah penduduk miskin antar kabupaten / kota di provinsi Jawa barat ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin antar kabupaten / kota di provinsi Jawa barat ?
3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin antar kabupaten / kota di provinsi Jawa barat ?
4. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin antar kabupaten / kota di provinsi Jawa barat ?

1.3 Tujuan penelitian :

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten / kota di provinsi Jawa barat.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten / kota di provinsi Jawa barat.

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh IPM terhadap jumlah penduduk miskin kabupaten / kota di provinsi jawa barat.
4. Menganalisis seberapa besar pengaruh angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin antar kabupaten / kota di provinsi jawa barat.

1.4 Manfaat penelitian :

1. Bagi penulis, penelitian ini di harapkan penulis dapat mengerti berbagai macam faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di provinsi jawa barat.
2. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tentang pengentasan kemiskinan di provinsi jawa barat.
3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu media informasi, sarana pembelajaran dan bahan untuk penelitian selanjutnya.
4. Dapat dijadikan kerangka penilaian kearah pembangunan dalam memecahkan masalah kemiskinan di provinsi jawa barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, gambaran atau sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai variabel dan pengukuran variabel, populasi dan sample penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya